

POLICY PAPER



Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

TIM PENYUSUN:

Raudatul Ulum

Fakhrudin

Rahmat Saehu

Farhan Muntafa

Rizky Riyadu Taufiq

Memelihara Kerukunan Antarumat, Menggagas Masa Depan Keberagaman Di Indonesia

POLICY PAPER

Memelihara Kerukunan Antarumat, Menggagas Masa Depan Keberagaman Di Indonesia

Policy Paper ini disusun berdasarkan hasil Penelitian
Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2021

Pengarah

Prof. Dr. Ahmad Gunaryo, M.Soc
Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian AgamaRI

Muharam Marzuki
*Sekretaris Badan Litbang dan
Diklat*

Penanggung Jawab Kegiatan

Prof. Dr. Muhammad Adlin Sila, Ph.D
*Kepala Puslitbang Bimas Agama dan
Layanan Keagamaan*

Koordinator Administrasi Penelitian

Rizky Riyadu Taufiq, M.Si

Tim Peneliti

Raudatul Ulum, M.E. (Ketua Tim) • Farhan Muntafa, M.Stat
• Fakhruddin M., S.Sos, M.Si • Rahmat Saehu, M.Si, • Achmad Rosidi
Ahmad Syafei • Fauziah • Deva Alvina Br. Sebayang, S.Si, MA • Paisal, SH •
Warnis, S.E., MM., Ph.D. • Fatimah Zuhrah • Andriansyah • Anah Suryanah
• Jerry • Eka Gustiana, M.Si. • Mulyana • Sumarsih • Parmiyanti
• H. Ibnu Hasan Muchtar, Lc. MA. • Ihyakulumudin • Hilman Taufik
• Fatchan Kamal • Abdul Jamil Wahab, S.Ag, M.Si
• Dra. Suhanah, M.Pd • Dra. Hj. Asnawati • Ibrahim • Rini Purwanti
• Dewi Indah Ayu • Dra. Anik Farida • Edi Junaedi S, Ag. • Sholahuddin
• Haris Burhani • Wakhid Sugiarto • Prof. Koeswinarno • Siti Atieqoh • Hj. Mia
Alvita • Elma Haryani, M.A. • Dr Umul Hidayati • Dian Roesdiana • Reslawati • R
Adang Novandi • Rusno Haji • Retno Kartini • Muhammad Salim • Ahsanul
Khalikin • Aries Widodo Raharjo • Agus Norbani • Agus Mulyono • Ova Mustofa
Asrori • Putu Intan • Diaz Martina, S.E. • Drs. H. Zaenal Abidin, M.Si., • Riska El
Haris • Abdul Kadir • Rizal Syarifuddin • Suaib Pranowo • Israfil • Nisa • Faisal
• Zaenal A. Eko Putro • Rosdiana



Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Jakarta, 2021

AKRONIM

Kemenag	: Kementerian Agama
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenko PMK	: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemenko Polhukam	: Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
KUB	: Kerukunan Umat Beragama
PPIM	: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat
Renstra	: Rencana Strategis
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional



DAFTAR ISI

AKRONIM.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
PENGANTAR.....	3
<i>Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)</i>	3
<i>Metode Survei KUB 2021</i>	4
KONDISI FAKTUAL.....	4
ANALISIS MASALAH.....	7
REKOMENDASI.....	10
DAFTAR PUSTAKA	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah survei nasional yang mengukur tingkat kerukunan umat masyarakat dalam beragama di Indonesia. Tiga dimensi Indeks KUB mencakup toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) pada tahun 2021 ini menunjukkan angka rata-rata nasional pada 72,39 dengan kategori tinggi, peningkatan pada tahun ini dibandingkan tahun lalu, yaitu 67,46. *Policy paper* (naskah kebijakan) ini secara khusus memuat analisis terhadap survei Kerukunan Umat Beragama (KUB). Dalam *policy paper* ini, kondisi faktual akan menampilkan keadaan sosial masyarakat Indonesia dan kebijakan yang ada terkait kerukunan. Kemudian, dalam analisis masalah, beberapa isu akan ditampilkan berdasarkan temuan dari survei KUB. Terakhir, rekomendasi kebijakan merupakan langkah langkah praktis bagi berbagai pemangku kebijakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Pertama, **kondisi faktual**. Sebagai bangsa majemuk, Indonesia menghadapi banyak potensi disintegrasi dan konflik di dalam masyarakat. Beberapa potensi konflik/ketidakrukunan telah memanifestasi di beberapa daerah berdasarkan berbagai penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Kementerian Agama RI mendesain 3 Sasaran Program (SP) yang menjadi bagian dalam SS (Sasaran Strategis) 2: “Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama,” yaitu: SP1 tentang *menurunnya frekuensi konflik antar umat beragama*; SP2 tentang *meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama*; dan SP3 tentang *meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama*.

Kedua, **analisis masalah**. Survei KUB menemukan beberapa permasalahan yang cukup serius dalam empat hal utama, yaitu:

1. **Toleransi:** 25% masyarakat Indonesia menolak untuk hidup bertetangga dengan agama lain. Selain itu 36% Masyarakat Indonesia keberatan penganut agama yang berbeda untuk membangun tempat ibadahnya meskipun telah mendapat izin dari pemerintah. Lalu 34% masyarakat Indonesia enggan jika masyarakat yang berbeda agama merayakan hari besar keagamaannya. Dan 29% orang tua di Indonesia tidak mengizinkan anaknya untuk bermain bersama teman yang berbeda agama. Secara umum. Skor Toleransi mendapatkan nilai rata-rata 68,72.
2. **Kesetaraan:** Sebanyak 23% masyarakat Indonesia tidak setuju jika kelompok agama menyiarkan agamanya. Dalam urusan penegakan hukum (ketika berurusan dengan polisi, misalnya), 19% masyarakat pernah diperlakukan secara tidak adil. Selain itu, dalam urusan pemimpin daerah, 35% masyarakat Indonesia sepakat untuk menolak pemimpin yang berbeda agama. Secara umum, dimensi kesetaraan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 75,03.
3. **Kerjasama:** ada 25% warga negara yang enggan untuk mengunjungi penganut agama lain dan juga berpartisipasi dalam gotong royong dengan penganut agama lain. 22% masyarakat menolak untuk membantu teman atau tetangga yang menganut agama berbeda. 30% masyarakat keberatan untuk terlibat usaha bersama teman yang berbeda agama. 25% masyarakat Indonesia keberatan untuk melakukan jual beli dengan teman atau tetangga dari penganut agama lain. Selanjutnya 29% masyarakat Indonesia keberatan untuk

berpartisipasi dalam komunitas yang melibatkan keanggotaan dari agama lain. Secara umum, dimensi kerjasama mendapatkan nilai rata-rata sebesar 73,41.

4. *Moderasi Beragama* warga negara Indonesia dalam kaitannya dengan kerukunan mendapatkan skor rata-rata 79,65 yang berarti Baik. Namun, Toleransi dalam meningkatkan moderasi keberagamaan hanya mencapai skor 68,71%.
5. *Kerukunan Internal* umat agama di Indonesia mendapatkan skor 61,28%. dimana 39% masyarakat beragama Indonesia menolah paham-paham ormas yang masuk.
6. *Faktor Sosiologis*, mendapatkan skor rata-rata 32,70% dalam mempengaruhi kerukunan.

Ketiga, **rekomendasi**. Berikut adalah alternatif kebijakan yang dapat diambil untuk menjawab permasalahan di atas:

PENGANTAR

Konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 29 telah memberikan jaminan dalam melaksanakan kebebasan berkeyakinan dan beragama. Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa Negara berdasar atas ayat 2 yang berbunyi, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Eksistensi individu dalam kehidupan sosial selalu terikat dengan ritus spiritual dan agama. Di Indonesia, enam agama; Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu telah diakui dan mendapatkan landasan hukum bagi setiap umatnya. Meskipun demikian, dinamika sosial baik yang bersifat internal maupun eksternal secara langsung dan tidak langsung mampu memberikan perubahan signifikan terhadap proses sosialisasi kehidupan antar umat beragama. Sejak tahun 2012 Kementerian Agama Republik Indonesia secara rutin telah melakukan Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama. Merujuk kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, kerukunan diartikan sebagai keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selama kurun enam tahun terakhir (2015-2019), hasil survei Kerukunan Umat Beragama (KUB) menunjukkan tren yang positif yakni dalam kategori kerukunan yang tinggi. Angka KUB nasional dalam lima tahun terakhir adalah, tahun 2015 (75,36), tahun 2016 (75,47), tahun 2017 (72,27), tahun 2018 (70,90), tahun 2019 (73,83), dan tahun 2020 (67,46).

Selama kurun enam tahun terakhir, hasil survei KUB menunjukkan tren yang positif yakni dalam kategori kerukunan yang tinggi.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)

Indeks KUB merupakan instrumen utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program kerukunan. Survei KUB sendiri dilakukan secara berkala oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Ini merupakan survei nasional yang memiliki sampel representatif di tiap daerah.

Secara khusus Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Balitbangdiklat Kementerian Agama bersama lembaga Indikator Politik Indonesia menyelenggarakan survei KUB di 34 Provinsi di Indonesia. Penelitian survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kerukunan antar umat beragama dengan mengacu pada tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Namun, selain 3 dimensi utama tersebut, informasi lain juga dikumpulkan untuk melihat data secara holistik.

Toleransi dimaknai dengan saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai perbedaan keyakinan.

Dimensi kesetaraan bermakna setara dalam pengamalan ajaran agama. Sedangkan dimensi kerjasama berarti terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Metode Survei KUB

Populasi survei KUB adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode *multistage random sampling*. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1220 orang. Dengan asumsi metode *simple random sampling*, ukuran sampel 1220 responden memiliki toleransi kesalahan (*margin of error--MoE*) sekitar $\pm 2.9\%$ pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (*spot check*). Dalam *quality control* tidak ditemukan kesalahan berarti.

Policy paper (naskah kebijakan) ini secara khusus memuat analisis terhadap hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk periode 2020. Naskah ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait penetasan masalah kerukunan.

KONDISI FAKTUAL

Keberagaman suku bangsa, etnis, bahasa, agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia merupakan potensi untuk mengelola kerukunan kehidupan sosial. Lebih khususnya, kerukunan antar umat beragama sebagai bagian yang terintegrasi dengan penanaman nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki peran menciptakan kerukunan di Indonesia.

1. Status Sosial-Keagamaan di Indonesia

Kondisi sosial keagamaan di Indonesia mengalami beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Berdasarkan survei SETARA Institute (2018), kota-kota besar seperti Jakarta, Padang, dan Makassar masuk ke dalam kota dengan tingkat toleransi yang rendah. Berikut adalah 10 kota dengan Indeks Kota Toleran terendah: Tanjung Balai (2,817), Banda Aceh (2,830), Jakarta (2,880), Cilegon (3,420), Padang (3,450), Depok (3,490), Bogor (3,533), Makassar (3,637), Medan (3,710), dan Sabang (3,757).

Kemudian, laporan penelitian Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta dan PPIM UIN Jakarta (2019) menyebutkan bahwa literasi keagamaan yang disusun oleh takmir masjid umumnya bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan *ukhuwah islamiyah* di antara para jamaah dan kaum Muslim pada umumnya.

Terkait penyuluh agama, hasil survei PUSAD Paramadina dan PPIM UIN Jakarta (2019) menunjukkan sebanyak 272 (54,6%) penyuluh agama Islam setuju dan sangat setuju jika pemerintah harus menerapkan hukum Islam secara absolut. Sebanyak 164 (32,9%) penyuluh juga sepakat bahwa dalam negara harus dijalankan sesuai dengan hukum agama dan di bawah otoritas pemimpin yang seagama.

Hal ini juga diperkuat oleh temuan Kementerian Agama RI melalui Indeks Kesalehan Sosial (IKS). IKS (2018) menunjukkan bahwa dalam dimensi kesalehan sosial sikap peduli (*caring*) menempati posisi terendah dengan nilai 61,09 dan sikap menghargai perbedaan dengan nilai 50,10. Kedua nilai tersebut berada di bawah skor rata-rata nasional.

Situasi yang disampaikan oleh berbagai penelitian ini tentu perlu mendapat intervensi dari Pemerintah untuk menjaga kondisi sosial-keagamaan yang kondusif.

2. Kondisi Kebijakan Kerukunan

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Kementerian Agama RI mendesain 3 Sasaran Program (SP) yang menjadi bagian dalam SS (Sasaran Strategis) 2: “Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama,” yaitu: SP1 tentang *menurunnya frekuensi konflik antar umat beragama*; SP2 tentang *meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama*; dan SP3 tentang *meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama*. Masing-masing SP memiliki Sasaran Kegiatan (SK) dan indikator dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Kerukunan dalam Renstra Kemenag 2020-2024

Aktivitas	Indikator
SP1: Konflik antar umat beragama	1. Persentase pembinaan FKUB 2. Persentase kasus konflik yang ditindaklanjuti
SK1: Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dalam hak beragama	1. Persentase kasus pelanggaran yang diselesaikan 2. Jumlah pembinaan aktor kerukunan 3. Jumlah pembinaan desa
SK2: Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan	1. Jumlah pembinaan lembaga, Ormas, tokoh 2. Jumlah forum dialog antar umat beragama
SK3: Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase pelayanan Sekber FKUB melalui BOP
SP2: Konflik intra umat beragama	Persentase kasus konflik yang diselesaikan
SK1: Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase pembinaan lembaga, Ormas, tokoh 2. Jumlah forum dialog intra umat
SK2: Meningkatnya penanganan konflik intra umat beragama.	Jumlah konflik yang ditindaklanjuti
SP3: Pembinaan moderasi beragama	Tingkat moderasi beragama kelompok binaan
SK1: Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat
SK2: Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah 2. Persentase pembinaan rumah ibadah
SK3: Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan berwawasan moderat di media massa dan ruang publik



ANALISIS MASALAH

Kondisi faktual telah ditampilkan dengan memaparkan hasil riset, kasus-kasus pemberitaan, dan langkah Kementerian

Agama yang mencoba menjawab dengan pendekatan kebijakan kerukunan.

Naskah kebijakan ini menyajikan 3 masalah utama yang ditemukan oleh survei KUB, yaitu:

1. Toleransi
2. Kesetaraan
3. Kerjasama



Indeks KUB 2021 adalah 72,39 dengan kategori “tinggi.”

Indeks KUB pada 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan 2020, yaitu 67,46. Indeks KUB 2021 adalah 72,39 dengan kategori “Tinggi.” Jika mengacu pada dokumen RPJMN 2020-2024, target Indeks KUB tahun ini meleset cukup banyak, meskipun angkanya masih dalam kategori “tinggi.” Dari target 75,8, realisasi yang dicapai yaitu 72,39.

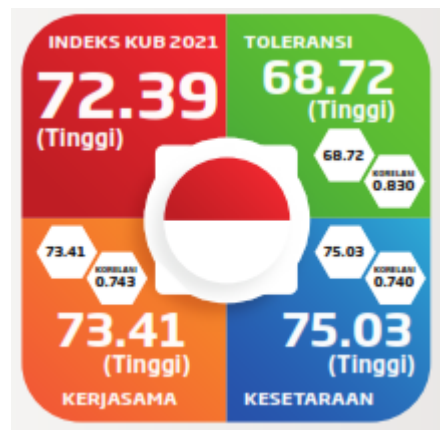
Gambar 1. Target Indeks Kerukunan Umat Beragama

Ini menandakan bahwa permasalahan kerukunan di Indonesia masih cukup serius. Indeks KUB memiliki 3 dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Tabel di bawah ini menunjukkan nilai rata-rata dari tiap dimensi:

KUB	72,39
Toleransi	68,72
Kesetaraan	75,03
Kerjasama	73,41

Gambar 2. Dimensi Indeks KUB 2021

Berikut adalah beberapa variabel yang dapat menjelaskan alasan Indeks KUB mengalami peningkatan yang cukup baik pada tahun 2021.



1. Toleransi

Toleransi di Indonesia masih perlu dipupuk. Banyak berita mewartakan penolakan warga terhadap pembangunan tempat ibadah dan ritual agama tertentu. Ternyata, hal ini dikonfirmasi oleh survei KUB yang mencatat bahwa 36% masyarakat Indonesia keberatan jika penganut agama lain membangun rumah ibadah di daerah sekitarnya dan 34% keberatan pada agama lain melakukan perayaan keagamaannya. Ini merupakan dua hak dasar warga negara yang menjadi masalah paling serius.

Lalu, 29% orang tua dari anak-anak masyarakat Indonesia keberatan jika anak-anak mereka bermain bersama penganut agama lain. Dan 25% dari masyarakat Indonesia masih keberatan jika hidp bertetangga dengan penganut agama lain.

Gambar 3. Toleransi Masyarakat Indonesia 2021



Secara umum, dimensi toleransi mendapatkan nilai rata-rata sebesar 64,15

2. Kesetaraan

Terkait dimensi kesetaraan, sebagai konfirmasi dari temuan sebelumnya, 35% masyarakat Indonesia tidak setuju bila orang beda agama dengan dirinya menjadi pimpinan di daerahnya. Lalu 23% masyarakat beragama Indonesia menolak untuk semua agama diberikan hak yang sama dalam menyiarkan agamanya. Dibandingkan dengan hal-hal lainnya yang membuat Dimensi Kesetaraan mempengaruhi kerukunan yaitu tahun 2021 indikator lainnya yang mempengaruhi kesetaraan dalam kerukunan hanya mengalami ketidaksetujuan masyarakat maksimal di angka 20%.

Gambar 5. Kesetaraan Masyarakat Indonesia 2021



Secara umum, Dimensi Kesetaraan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 75,03 yang berarti sudah baik.

3. Kerjasama

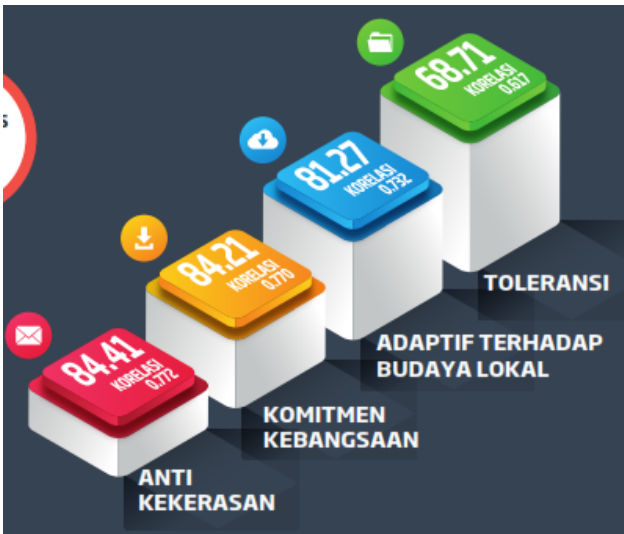
Terkait dimensi kerjasama, masyarakat cenderung untuk tidak terlibat usaha yang dikelola oleh penganut agama lain sebanyak 29,5%. 29% masyarakat enggan untuk berkunjung ke rumah penganut agama lain dan enggan untuk bergabung dalam satu komunitas yang sama dengan penganut agama lain. 25% masyarakat Indonesia enggan untuk melakukan gotong royong untuk lingkungannya dengan penganut agama lain dan melakukan jual beli dengan penganut agama lain. Dan 22% masyarakat Indonesia keberatan jika harus membantu penganut agama lain yang mengalami musibah.

Gambar 4. Kerjasama Masyarakat Indonesia 2021



Secara umum, dimensi kerjasama mendapatkan nilai rata-rata sebesar 73,41.

4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kerukunan



Faktor Moderasi Beragama

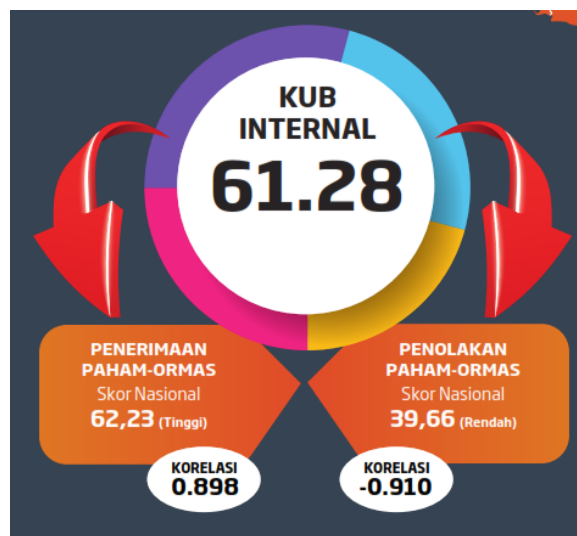
Riset tentang toleransi menemukan sejumlah faktor di luar nilai-nilai liberal yang berkorelasi atau turut memberikan pengaruh terhadap sikap toleran seseorang/kelompok. Artinya, di luar nilai kesetaraan (liberal, plural) terdapat sejumlah faktor yang potensial untuk menjelaskan mengapa seseorang/kelompok bersikap toleran dan tidak toleran. Di antara yang penting adalah faktor yang tidak asing lagi di dengar yaitu Moderasi Beragama.

Kajian Moderasi Beragama yang mempengaruhi kerukunan umat beragama 2021 berada di angka 79,65 yang berarti baik. Dimensi yang mempengaruhi dalam kerukunan yang merepresentasikan moderasi beragama yaitu pertama Anti Kekerasan, dimana skor yang didapatkan yaitu 84,41%. Lalu Komitmen Kebangsaan masyarakat Indonesia dalam menjaga kerukunan mendapatkan skor 84,21. Selanjutnya Adaptif terhadap budaya lokal berada di angka 81,27. Selanjutnya Toleransi dalam Moderasi beragama hanya mendapatkan skor 68,71

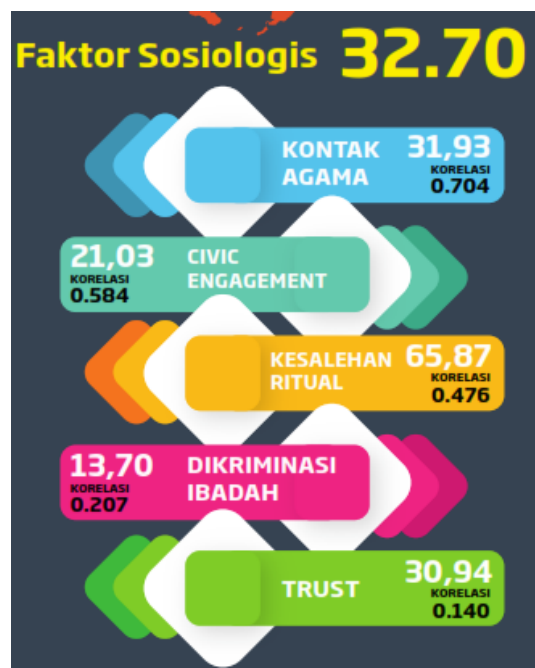
Faktor Kerukunan Internal

Faktor selanjutnya yang dapat menjaga Kerukunan antarumat yaitu Hamonisasi Internal Agama atau

hubungan masyarakat Indonesia dengan rekan atau sahabat yang seiman yang mana mendapatkan angka rerata 61,28. Kajian KUB 2021 mencari tahu sejauh mana penerimaan masyarakat terhadap paham paham ormas dalam mempengaruhi kerukunan Internal yaitu didapatkan skor rerata terkait hal tersebut 62,23 yang berarti tinggi. Disamping itu penolakan masyarakat Indonesia terhadap paham-paham keagamaan tersebut berada di angka 39,66.



Faktor Sosiologis



Faktor-faktor sosilogis yang dianggap mempengaruhi kerukunan warga negara Indonesia, pada tahun 2021 ini mendapatkan skor rata-rata 32,70. Dimana faktor-faktor tersebut berada pada penilaian kontak agama yang hanya mencapai 31,93. Lalu civic engagement yang hanya menunjukkan rerata 21,03. Selanjutnya kesalehan ritual masyarakat Indonesia yang dianggap mempengaruhi keadaan sosialogis masyarakat dalam mempengaruhi kerukunan mendapatkan skor rata-rata 65,87. Disisi lain, masyarakat Indonesia masih ada yang mengalami diskriminasi dalam melakukan ibadah agama mereka, yaitu di angka 13,70. Dan kepercayaan masyarakat terhadap aktor-aktor terkait kerukunan antarumat tergolong masih rendah yaitu hanya mencapai rata-rata 30,94.

REKOMENDASI

Berikut adalah rekomendasi bagi *stakeholder* terkait untuk menyelesaikan masalah kerukunan di Indonesia:

Faktor yang melakukan Program :

- a. FKUB;
- b. Ormas Keagamaan;
- c. Pemuda (Millenial Group) lintas agama;
- d. Minority Group;
- e. Kelompok Budaya lintas agama;
- f. Penyuluh Agama lintas agama;
- g. Pemerintah Daerah;
- h. Dinas Pendidikan;
- i. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- j. Kantor Kementerian Agama.

Rekomendasi dari alternatif yang dapat dilakukan yaitu:

1. Penguatan Sinergisitas antar lembaga terkait Kerukunan.
2. Meningkatkan dimensi toleransi untuk setiap provinsi dengan melibatkan pemuda daerah melalui kegiatan social lintas keagamaan
3. Membuat program kerjasama dengan pihak terkait untuk daerah yang belum ada program kerjasama antar umat beragama
4. Perlunya peningkatan program moderasi beragama khususnya aspek toleransi melalui kegiatan penyuluhan/dialog/sosialisasi
5. Meningkatkan ketiga aspek; *Trust, Civic Engagement, dan kontak agama* melalui kegiatan forum dialog, kerjasama social antar umat beragama, (misalnya: menjaga keamanan lingkungan, membangun kepercayaan bersama)
6. Penyuluh agama perlu meningkatkan kesalehan ritual masyarakat melalui kegiatan ceramah keagamaan dan pendampingan ritual keagamaan
7. revitalisasi tradisi
8. Keoptimalan penyuluh sebagai duta KUB, bagaimana dikuatkan untuk pengarusutamaan moderasi beragama.
9. Menambah Kurikulum Pendidikan Agama yang menjadi satu kunci utama agar toleransi menjadi tinggi.
10. Perlunya dimunculkan tentang Pendidikan multi kultural. Perlu diterapkan untuk mengedukasi para pemuda.
11. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menyatukan antar agama
12. Penataan ruang-ruang publik di kota (memperbanyak taman kota yang inklusif, perpustakaan).

13. Pemerintah daerah membuat rancangan peraturan terkait Transmigrasi masyarakat ke Pemukiman yang didiami dari berbagai macam agama (Untuk Meningkatkan Toleransi dalam Umat Beragama).

14. Rekrutmen calon pengurus FKUB harus inklusif, pluralis dan memperbanyak kalangan muda sebagai pengurus dari berbagai macam agama (Lintas Agama).



DAFTAR PUSTAKA

Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019. Kementerian Agama RI.

Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2020. Kementerian Agama RI.

Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2018. (2018). Kementerian Agama RI.

Indeks Kota Toleran Tahun 2018. Setara Institute. Diperoleh dari:

<http://setarainstitute.org/en/indeks-kota-toleran-tahun-2018/>

Literasi keagamaan: Takmir, imam, khatib. (2019). Convey Indonesia. Diperoleh dari:

<https://conveyindonesia.com/download/1570/>

Merawat kesalehan umat: Buletin Jumat dalam dinamika paham keagamaan. (2019). Convey

Indonesia. Diperoleh dari: <https://conveyindonesia.com/download/1574/>

Persepsi ulama tentang Negara-Bangsa: Otoritas, negosiasi, dan reservasi. (2019). Convey

Indonesia. Diperoleh dari: <https://conveyindonesia.com/download/1566/>

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024.

(2020).Kementerian Agama RI.



Diterbitkan Oleh:

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Jl. H. M. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat
Telp/Fax: (021) 21201516, 3920380, 3920674
Website: balitbangdiklat.kemenag.go.id
Email : balitbangdiklat@kemenag.go.id

ISBN 978-979-797-398-8

